

KEGIATAN DPR-RI MINGGU PERTAMA JULI 2012

Minggu-minggu akhir Juni-awal Juli 2012 Masa Persidangan IV tahun sidang 2011-2012, Dewan tetap fokus pada pelaksanaan fungsi bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Kegiatan awal Juli ini menggambarkan kegiatan DPR pada akhir bulan Juni, baik di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan, maupun penetapan pejabat publik. Berikut ringkasan kegiatan Dewan minggu ini.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Ali

RAPAT PARIPURNA 26 JUNI 2012

Rapat Paripurna tanggal 26 Juni memiliki 2 agenda pokok yaitu Laporan Komisi XI mengenai Hasil Pembahasan Calon Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilanjutkan pengambilan keputusan, dan pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas 4 RUU Konvensi yaitu RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Ceko tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan, dan RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Pertahanan Keamana RI dan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang Kerjasama dalam Bidang Peralatan Logistik dan Industri Pertahanan (Komisi I). pembicaraan tingkat II RUU tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, dan RUU tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (Komisi VIII).

Pada awal Rapat, Ketua Rapat/Korpul, menyampaikan pengumuman beberapa surat masuk antara lain: [1] pengajuan permohonan untuk diagendakan RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri atas usulan Komisi IX, [2] surat-surat Presiden antara lain penyampaian 2 RUU Konvensi yaitu RUU tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Acces to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* dan RUU tentang Pengesahan *Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemical and Pesticides in International Trade*, dan [3] surat presiden perihal penyampaian RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

Pada laporan Komisi XI mengenai OJK yang disampaikan



oleh Ketua Komisi XI Emir Moeis, disampaikan bahwa pengambilan keputusan diambil melalui 2 tahap. *Tahap pertama* adalah memilih Ketua Dewan Komisiner. Sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Tata Tertib DPR, dalam pemilihan Ketua Dewan Komisiner OJK, Komisi XI berdasarkan musyawarah dan mufakat menyepakati secara aklamasi memilih Muliaman Darmansyar Hadad sebagai Ketua Dewan Komisiner OJK masa jabatan 2012-2017. *Tahap kedua*, memilih anggota Dewan Komisiner OJK, yaitu 6 orang anggota dari 13 calon anggota Dewan Komisiner. Sesuai ketentuan pasal 272 Tata Tertib DPR, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Adapun 6 calon terpilih den-

gan urutan berdasarkan perolehan suara sebagai berikut: Nurhaida, Firdaus Djaelani, Kusumaningastuti S. Soetiono, Ilya Avianti, Nelson Tampubolon, dan Rahmat Waluyanto.

Setelah ditetapkan oleh Paripurna, maka proses selanjutnya diserahkan kepada Presiden untuk dikukuhkan melalui keputusan Presiden.

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

[1] Pimpinan Komisi I dihadapan Rapat Paripurna tanggal 26 Juni, melaporkan hasil pembahasan mengenai RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Ceko tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan, dan RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Pertahanan Keamana RI dan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang Kerjasama dalam Bidang Peralatan Logistik dan Industri Pertahanan, menyampaikan bahwa Komisi I dan seluruh fraksi mencermati secara seksama aspek substansi kerjasama dan perjanjian internasional antara RI dengan Republik Ceko dan Italia, serta mempertimbangkan aspek pentingnya kedua

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** DJaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Dwi Maryanto, S.Sos (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Dadang Prayitna, S.IP.,MH (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Eka Hindra; Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

RUU. Setelah dilakukan pembahasan mendalam dan kritis, dan setelah mendengarkan pandangan fraksi dan jawaban pemerintah, Komisi I memutuskan bahwa pelaksanaan dari kedua perjanjian tersebut dalam bentuk **Peraturan Presiden**. Adapaun landasan pemikiran yang mendasari sikap Komisi I antara lain: bahwa Pasal 10 UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan UU apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara; perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara RI; kedaulatan hak berdaulat; HAM dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum; pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Lebih lanjut Pasal 11 UU No. 24 tahun 2000 dijelaskan pula bahwa pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden. Hal ini juga dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 11 UU No. 24 tahun 2000 yang menyatakan bahwa jenis-jenis perjanjian yang masuk kategori ini diantaranya adalah perjanjian yang menyangkut kerjasama di bidang iptek, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, dan kerjasama perlindungan penanaman modal serta perjanjian yang bersifat teknis.

Materi muatan atau ruang lingkup dari kedua perjanjian yang dibahas oleh Komisi I tersebut merupakan kerjasama yang bersifat teknis dalam kaitan pertukaran informasi dan pengembangan urusan pertahanan. Dengan pertimbangan tersebut maka Komisi I mengatakan bahwa pengesahan dan pelaksanaan dari kedua perjanjian internasional tersebut dalam bentuk **peraturan presiden**. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 UU No. 11 tahun 2012 tentang Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang menggantikan UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Atas laporan Komisi I tersebut, Rapat Paripurna menyetujuinya dan selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden untuk diproses lebih lanjut.

[2] Adapun 2 RUU Komisi VIII, yaitu RUU tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, dan RUU tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata, disetujui untuk disahkan menjadi UU. Atas kedua RUU ini, Pemerintah menyambut baik atas selesainya pembahasan kedua RUU oleh Komisi VIII dan berupaya untuk dapat memastikan bahwa pemberantasan tindak pidana penjualan, prostitusi dan pornografi anak dapat dilakukan secara efektif, baik pada tingkat nasional maupun memperkuat kerjasama tingkat bilateral, regional dan global. Pengesahan kedua RUU ini membuktikan bahwa kita semua memiliki komitmen dan keseriusan, baik dari kalangan Pemerintah maupun Parlemen, dan seluruh elemen bangsa untuk memperkuat upaya tersebut.

Atas selesainya pembahasan kedua RUU ini, Ketua Komisi VIII dalam laporannya mengatakan bahwa kedua RUU ini memiliki nilai strategis dalam penyempurnaan sekaligus pembaruan sistem hukum nasional khususnya dalam hal pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak-hak anak.

Lebih dari itu, ratifikasi konvensi ini menunjukkan komitmen dan kesungguhan negara untuk menghormati, memajukan, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak-hak tersebut. Meskipun sesungguhnya bangsa Indonesia sangat terlambat dalam meratifikasi konvensi ini, namun dengan disahkannya kedua konvensi ini, maka diharapkan ada kesamaan pandangan dan pemahaman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan konvensi ini yang pada dasarnya merupakan bentuk dan pengejawantahan dalam upaya meningkatkan pemenuhan, penghormatan dan perlindungan anak, sebab anak-anak menjadi penentu masa depan bangsa.

[3] Dalam minggu ini, ada 2 RUU konvensi yang telah disampaikan Presiden ke DPR yaitu RUU tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Acces to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* dan RUU tentang Pengesahan *Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemical and Pesticides in International Trade*, yang akan ditangani oleh Komisi VII. Selain itu, dalam Rapat Bamus diputuskan RUU tentang Perindustrian akan ditangani oleh Komisi VI.

[4] RUU tentang Sistem Peradilan Anak dijadwalkan akan memasuki pembicaraan tingkat II pada Rapur tanggal 3 Juli 2012. [5] RUU usul Komisi IX tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, akan diputuskan menjadi RUU DPR pada Rapur tanggal 5 Juli.

PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

[1] Laporan Pimpinan Banggar DPR-RI mengenai hasil Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2013 dijadwalkan pada tanggal 3 Juli 2012.

[3] Selanjutnya, RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2011, diagendakan untuk dilakukan Rapur pada tanggal 28 Juni, dengan acara Keterangan Pemerintah mengenai Pokok-Pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2011. Tanggal 3 Juli, diagendakan pandangan fraksi-fraksi terhadap materi RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2011. Tanggal 5 Juli, diagendakan tanggapan Pemerintah terhadap fraksi-fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2011.

Dari agenda beberapa RUU yang segera dibahas di DPR dan agenda pelaksanaan RUU yang berkaitan dengan anggaran, maka dijadwalkan rapat-rapatnya sebagai berikut. (tabel).

dalam meratifikasi konvensi ini, namun dengan disahkannya kedua konvensi ini, maka diharapkan ada kesamaan pandangan dan pemahaman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan konvensi ini yang pada dasarnya merupakan bentuk dan pengejawantahan dalam upaya meningkatkan pemenuhan, penghormatan dan perlindungan anak, sebab anak-anak menjadi penentu masa depan bangsa.

[3] Dalam minggu ini, ada 2 RUU konvensi yang telah disampaikan Presiden ke DPR yaitu RUU tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Acces to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* dan RUU tentang Pengesahan *Rotterdam Convention on the Prior In-*

formed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemical and Pesticides in International Trade, yang akan ditangani oleh Komisi VII. Selain itu, dalam Rapat Bamus diputuskan RUU tentang Perindustrian akan ditangani oleh Komisi VI.

[4] RUU tentang Sistem Peradilan Anak dijadwalkan akan memasuki pembicaraan tingkat II pada Rapur tanggal 3 Juli 2012. [5] RUU usul Komisi IX tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, akan diputuskan menjadi RUU DPR pada Rapur tanggal 5 Juli.

PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

[1] Laporan Pimpinan Banggar DPR-RI mengenai hasil Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2013 dijadwalkan pada tanggal 3 Juli 2012.

[3] Selanjutnya, RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2011, diagendakan untuk dilakukan Rapur pada tanggal 28 Juni, dengan acara Keterangan Pemerintah mengenai Pokok-Pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2011. Tanggal 3 Juli, diagendakan pandangan fraksi-fraksi terhadap materi RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2011. Tanggal 5 Juli, diagendakan tanggapan Pemerintah terhadap fraksi-fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2011.

Dari agenda beberapa RUU yang segera dibahas di DPR dan agenda pelaksanaan RUU yang berkaitan dengan anggaran, maka dijadwalkan rapat-rapatnya sebagai berikut. (tabel).

KEGIATAN ANTAR-PARLEMEN

NO.	Hari/Tanggal	Acara
1.	Rapat Paripurna, Kamis, 28 Juni 2012.	Keterangan pemerintah mengenai pokok-pokok RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2011
2.	Rapat Paripurna, Selasa, 3 Juli 2012.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Sistem Peradilan Anak. 2. Pandangan fraksi terhadap materi RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN TA 2011 yang disampaikan Pemerintah. 3. Laporan Banggar DPR-RI mengenai hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2013.
3.	Rapat Paripurna, Kamis, 5 Juli 2012.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas materi RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN TA 2011.. 2. Pendapat fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU usul inisiatif Komisi IX DPR tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri menjadi RUU DPR.

Ketua DPR-RI Marzuki Alie sebagai Presiden ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) disertai Pimpinan BKSAP melakukan Kunjungan Kerja ke Malaysia, Singapura dan Myanmar pada tanggal 24 – 30 Juni 2012.

Pada kunjungannya di Malaysia, Ketua DPR RI Marzuki Alie meminta kepada Parlemen Malaysia agar memberikan perlindungan dan mendukung penyelesaian kasus-kasus yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Ketua DPR meminta agar pihak Parlemen Malaysia dapat mendorong pemerintah Malaysia melakukan langkah-langkah tegas dan konsisten dalam mengimplementasikan *Protocol Amendment MoU on the Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers 2006* yang telah ditandatangani pada tahun 2011. Menurutnya, masyarakat Indonesia sangat mengapresiasi Malaysia sebagai negara penerima tenaga kerja Indonesia terbesar di dunia. Jumlah warga negara Indonesia yang saat ini bekerja di Malaysia mencapai 2 juta orang, dan terus bertambah setiap tahun. Namun, sejumlah fakta yang menyebutkan bahwa cukup banyak tenaga kerja asal Indonesia meninggal dunia setiap tahunnya di Malaysia. Demi keadilan hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kasus ini perlu ditangani dengan serius oleh kedua belah pihak, baik Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja (*sending country*) maupun Malaysia sebagai negara penerima (*receiving country*). *

Capaian WTP ke-3 kali Setjen DPR, Jawab Keraguan Publik

Untuk ketiga kalinya dan tiga tahun berturut-turut Sekretariat Jenderal DPR RI kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan 2011 dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Keberhasilan ini diharapkan dapat menjawab keraguan publik terhadap kinerja DPR RI dalam mengelola keuangan negara.

“Sebagian warga masyarakat selama ini selalu menyoroti masalah keuangan yang dikelola DPR RI terutama di kesetjen-nya dikatakan buruk, tetapi Alhamdulillah pada hari ini kita buktikan hasil audit lembaga profesional BPK laporan keuangan DPR diberi opini WTP – Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Nining Indra Saleh Sekjen DPR RI usai menerima Hasil Pemeriksaan di Gedung Diklat BPK, Kalibata, Jakarta, Selasa (26/6/12).

Sebelumnya, tambah Nining, pada Laporan Keuangan tahun 2009 dan 2010, Setjen DPR yang berdasarkan UU mendapat mandat menjadi pengelola dan pengguna anggaran untuk anggota dewan dan kesetjenan juga berhasil meraih opini WTP. “Capaian ini menunjukkan APBN yang nota bene uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai aturan perundang-undangan,”ujarnya.

Ia menambahkan untuk langkah selanjutnya akan mengajak seluruh jajaran di kesetjenan untuk menjadikan tertib anggaran ini sebagai budaya organisasi yang tidak terpisahkan, bukan sekedar target untuk mengejar penghargaan. “Jangan sekedar seremoni ya, tapi harus jadi budaya dalam pekerjaan kita,” tandasnya.

Sementara itu anggota BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan ada 4 fokus utama dalam pemeriksaan laporan keuangan kementerian dan lembaga negara, yaitu kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan penyampaian laporan informasi keuangan dalam laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian internal.



Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh saat menerima penghargaan WTP dari Ketua BPK Hadi Purnomo, di Gedung Diklat BPK, Jakarta, Selasa, (26/6)



“Berdasarkan undang-undang BPK juga harus mengungkapkan apabila dalam laporan keuangan ditemukan ketidakpatuhan dan kecurangan baik yang berpengaruh maupun yang tidak berpengaruh pada opini atas laporan keuangan,” tandasnya.

Dia secara khusus memberikan

apresiasi kepada 4 institusi yang tahun ini naik dari predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ke WTP yaitu Kemensos, BNPB, BKKBN dan Badan Informasi Geospasial. Penurunan prestasi dari opini WTP ke WDP diperoleh oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). (iky) foto:wy

Komisi III DPR Setujui RUU Sistem Peradilan Pidana Anak

Rapat Pleno Komisi III DPR akhirnya menyepakati RUU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) untuk segera disetujui pada rapat paripurna. Langkah ini dapat dianggap sebagai peletakan tonggak pembaharuan sistem peradilan anak di Indonesia.



Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin (tengah) berpose bersama se usai penandatanganan RUU Sistem Peradilan Pidana Anak



Menkumham, Amir Syamsudin beserta jajarannya saat membahas RUU Sistem Peradilan Pidana Anak

“Banyak substansi baru yang belum pernah diterapkan di Indonesia semua bersumber dari banyak pihak termasuk berbagai elemen masyarakat. Bisa dikatakan keberhasilan ini tonggak pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia,” kata pimpinan sidang sekaligus Wakil Ketua Komisi

III DPR Azis Syamsudin dalam rapat kerja di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/6).

Ia menambahkan ada beberapa isu krusial yang berhasil diselesaikan diantaranya, kategori tindak pidana yang bisa didiversi yaitu apabila hukumannya kurang dari 7 tahun. Syarat dan tata cara

serta jangka penangkapan dan jangka penahanan. Adapun proses peradilan diputuskan melibatkan masyarakat dan lembaga perlindungan anak.

Azis mengatakan, keputusan yang tidak kalah penting adalah pengaturan sanksi pidana dan sanksi administrasi bagi petugas dan aparat penegak yang tidak menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya sesuai undang-undang.

“Kami menyetujui batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum yaitu telah berumur 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Anak dalam usia tersebut secara psikologis masih rentan terhadap pengaruh lingkungan. Jadi perlu penanganan khusus saat berhadapan dengan hukum,” kata juru bicara F-PPP Kurdi Mukri saat menyampaikan pandangan mini fraksinya.

Menurut Syarifudin Sudding (F-Hanura), penerapan konsep Diversi dan Restorative Justice sebagai upaya perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. “Keadilan restoratif merupakan satu proses diversi dimana semua pihak yang terlibat dalam satu tindak pidana tertentu bersama-sama menyelesaikan masalah, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain dalam upaya mencari solusi tidak berdasarkan hukum pembalasan,” papar Sudding

Menkumham Amir Syamsudin dalam sambutannya mengatakan, akan memanfaatkan waktu 5 tahun sebagai masa transisi untuk mempersiapkan infrastruktur, sarana prasarana pendukung, termasuk lembaga baru yang akan mengemban tugas sesuai amanat UU SPPA.

“Perlu dilakukan pula sosialisasi secara masif agar masyarakat dapat memahami pesan utama dari undang-undang ini,” kata Menkumham yang didampingi Meneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Mensos dan Menpan dan RB. (iky)foto:wy/parle

Panja RUU Pertanahan Terima Masukan Pakar Agraria

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan menerima masukan dari berbagai pakar agraria terhadap draft RUU dan naskah akdemis RUU Pertanahan yang saat ini sedang disusun oleh Komisi II DPR.

Menurut Guru Besar Hukum Agraria dan Sosiologi Hukum Fakultas Hukum UGM Prof. Nurhasan Ismail, ruang lingkup yang ingin diatur dalam RUU sudah cukup komprehensif karena disamping berisi pengaturan tentang aspek yang bersifat umum juga sudah memasukkan bidang-bidang hukum pertanahan yaitu penatagunaan tanah, pendaftaran tanah, pengurusan hak atas tanah, dan penyelesaian sengketa-sengketa pertanahan.

“Namun demikian, ada beberapa catatan umum yang perlu mendapat perhatian, diantaranya, suatu UU seharusnya lebih menekankan pada ketentuan yang prinsip-prinsip saja,” kata Nurhasan saat RDP dengan Panja RUU Pertanahan Komisi II DPR, di Jakarta, Senin (25/6).

Ia menambahkan, RUU pertanahan ini tampaknya belum mencerminkan prinsip hukum pertanahan namun sebaliknya justru sudah mengandung ketentuan yang bersifat teknis yang seharusnya menjadi materi muatan peraturan pemerintah atau peraturan Presiden.

Selain itu, dalam masukannya, Nurhasan menjelaskan, UU Pertanahan yang dibangun di era reformasi seharusnya disamping menjabarkan UUD 1945 amandemen juga menjabarkan asas-asas hukum yang sudah ditentukan dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. “Namun RUU ini tampaknya belum secara akomodatif menjabarkan amanah UUD 1945 amandemen yang terkait dengan pertanahan,” tegasnya.

Selanjutnya, kata Nurhasan, ada sedikit penurunan semangat dari RUU untuk merespon dan mengakomodasi tuntutan reformasi dibidang pertana-



Wakil Ketua Komisi II DPR Hakam Naja saat memimpin Rapat Panja RUU Pertanahan

han termasuk yang sudah dirumuskan dalam TAP MPR No.IX/MPR/2001 seperti reforma agraria dan hak ulayat sebagai langkah kongkret untuk mengurangi atau bahkan meredam konflik pertanahan yang bersifat structural.

“Sebaliknya RUU ini tampaknya

belum bisa melepaskan diri dari ikatan emosional dengan politik pematian-suri-an reforma agraria dan hak ulayat masyarakat hukum adat yang nyata-nyata masih ada,” jelasnya

Dalam masukan lainnya, Nurhasan menerangkan, terkait upaya penyelesaian konflik pertanahan dengan



Jajaran Akademisi yang dimintai pendapat saat membahas RUU Pertanahan

membentuk Peradilan Pertanahan sekalipun, tidak akan pernah mampu mengakhiri konflik struktural pertanahan, jika persoalan diwilayah hulunya yaitu kesenjangan penguasaan dan pemanfaatan tanah tidak pernah ditangani secara sistematis.

“Kebijakan yang paling ampuh secara preventif mencegah konflik struktural adalah mengaktifkan kembali penyelenggaraan landreform dengan penyesuaian tertentu,”paparnya.

Dalam kesempatan ini, Panja RUU Pertanahan juga menerima masukan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), melalui Deputi Sekjen KPA Bidang Kajian dan Kampanye Iwan Nurdin. Ia menjelaskan sedikitnya terdapat tiga kelompok besar yang tengah ‘bertarung’ dalam menginterpretasi UUPA 1960, yang pertama, adalah

kelompok pro-dasar yang diwakili oleh pihak Bank Dunia (LMPDP) dan ADB (TA). Kelompok ini mendorong penghapusan UUPA 1960 dari muka bumi Indonesia, karena ia dipandang sebagai penghalang utama bagi terciptanya pasar tanah (land market) di Indonesia.

“Kelompok kedua adalah, kelompok yang gigih mempertahankan UUPA sebagaimana adanya dan sebagaimana dia ditetapkan sejak tahun 1960. Motto kelompok ini, adalah laksanakan UUPA 1960 secara murni dan konsekwen,”jelas Iwan dihadapan.

Selanjutnya, tambahnya, kelompok ketiga, perlu dilakukan sejumlah amandemen pada UUPA dengan mempertahankan nilai dan spirit UUPA, “Kelompok ketiga memandang UUPA tetap dapat dijadikan sebagai panduan

bagi peletakan dasar-dasar penyusunan hukum agrarian nasional, UUPA (yang diperbarui) ini, diyakini dapat menjadi alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan dan rakyat,”terangnya.

Memperhatikan draft dan naskah akademis RUU Pertanahan, Iwan memberikan catatan pokok mengenai RUU Pertanahan, yaitu, RUU yang sedang dibahas sebenarnya lebih tepat disebut RUU Hak Atas Tanah, RUU ini tidak menjawab kemelut rimba hukum di bidang pertanahan yang seharusnya disederhanakan dan terkoordinir dengan tujuan UUPA, RUU ini mendorong pendaftaran tanah, pengakuan hak tanpa dilandasi semangat reforma agrarian, perlu perombakan total, dan RUU Reforma Agraria lebih penting.(nt) foto:wy/parle

Jazuli Juwaini Gantikan Surahman Hidayat Sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR

Jazuli Juwaini menggantikan Surahman Hidayat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR PKS. Rapat pengukuhan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan di Gedung Nusantara II, Kamis, (21/6).



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (tengah) menyaksikan penyerahan palu pergantian Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Surahman Hidayat (pojok kanan) kepada Jazuli Juwaini (dua dari kanan)

“Saya cuma berharap semoga Komisi VIII makin solid lagi, lebih produktif lagi, lebih komunikatif lagi, dan bisa menghasilkan sejumlah pruduk yang bisa memberikan masla-

hat bagi masyarakat. Rakyat Indonesia.” Kata Jazuli sesuai proses pengukuhan oleh Pimpinan DPR.

Jazuli Juwaini menggantikan Surahman Hidayat yang diangkat menjadi

Ketua BKSAP berdasarkan surat FPKS tertanggal 23 Mei 2012 yang selanjutnya ditetapkan pada Rapat Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan DPR RI, dan tentunya berdasarkan persetujuan Fraksi dan mayoritas Anggota Komisi VIII DPR.

“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR terkait dengan surat dari FPKS ini menanyakan kepada bapak dan ibu untuk meresponnya, apakah diterima penggantian Wakil Ketua Komisi VIII ini disetujui?” Tanya Taufik, dan serempak menjawab “setuju”. Akhirnya Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengetok palu sebagai tanda persetujuannya.

Pengukuhan secara simbolis dengan penyerahan palu dari Wakil Ketua DPR kepada Jazuli Juwaini disaksikan Ketua Komisi VIII Ida Fauziyah dan dihadiri Surahman Hidayat yang saat ini bertugas di Komisi X dan menjadi Ketua BKSAP. (ray)

Komisi IX DPR Desak Menkes Jalankan Program Kesehatan Reproduksi

Komisi IX DPR mendesak Kementerian Kesehatan untuk menjalankan program kesehatan reproduksi khususnya program pencegahan dan penanggulangan seks bebas, penyebaran HIV dan AIDS dengan berpegang pada ketentuan dalam UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan.



Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi sat rapat kerja dengan Komisi IX DPR



Nova Riyanti Wakil Komisi IX DPR

Demikian salah satu butir kesimpulan Raker Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi di Gedung Nusantara I, Senin, (25/6).

Komisi IX DPR juga meminta melalui pemerintah agar Kementerian Kesehatan untuk segera menyerahkan RUU tentang Tenaga Kesehatan yang merupakan RUU Prioritas dalam daftar Prolegnas tahun 2012 agar dapat segera dibahas.

Dikemukakan juga bahwa Komisi IX DPR juga mendorong Kementerian Kesehatan untuk melanjutkan program-program yang telah menjadi prioritas pembangunan kesehatan dengan terus melakukan terobosan-terobosan guna mencapai target MDGS dan RPJMN 2009-2015.

Dalam persiapan pelaksanaan BPJS kesehatan per 1 Januari 2014 termasuk fasilitas kesehatan dan SDM kesehatan, Jamkesmas termasuk juga pemutakhiran data peserta sehingga tepat sasaran, revitalisasi Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dengan dukungan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Terkait mengenai persoalan Kondom, lanjut Wakil ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf, secara umum masyarakat belum bisa memahami tentang penggunaan kondom, karena masih ada standar ganda tentang moralitas, dan keengganan serta budaya ketimuran.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti menambahkan, bahwa untuk melakukan perubahan itu perlu di-

lakukan konseling yang belum dilakukan oleh Menteri Kesehatan. "Karena masyarakat kita belum tentu semua memahami tentang penggunaan kondom secara tepat dan benar,"ujarnya.

Nova Riyanti juga mengemukakan, masalah perilaku seks yang dilakukan oleh para remaja-remaja belum tentu mau jika diberi himbuan untuk memakai kondom, karena mereka pasti malu dan sungkan jika membeli kondom di warung maupun di toko.

Dia juga menegaskan, sebetulnya jika sudah dihimbau untuk tidak melakukan seks namun mereka tetap melakukan maka harus berhati-hati, dan jangan melakukan karena seks bebas adalah sangat berbahaya dalam kesehatan khususnya mudah tertular penyakit HIV/AIDS. (Spy).foto:wy/parle

Komisi X DPR : Program Promosi Pariwisata Perlu Ditingkatkan

Dalam rangka mencari target Wisata Manca Negara (wisman) 9 juta orang dan Wisata Nusantara (wisnus) sebanyak 250 juta perjalanan dan peningkatan devisa negara pada tahun 2013, Komisi X DPR mendesak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meningkatkan program promosi pariwisata guna menarik wisatawan mancanegara.



Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu beserta jajarannya



Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu (kiri) beserta jajarannya

Hal itu terungkap saat Rapat kerja antara Komisi X DPR dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, di Gedung Nusantara I, Senin (25/6) siang.

Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto menambahkan, perlunya upaya pening-

katan peringkat daya saing yang dikeluarkan oleh World Economic Forum dari tahun 2011, serta program penyelenggaraan event Internasional dalam rangka mempromosikan destinasi pariwisata baru perlu dikembangkan.

Agus Hermanto juga mengatakan,

perlu ada pembagian peran dan tugas yang jelas antara Ditjen Pemasaran Pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

Target program/kegiatan PNPM untuk pengembangan desa wisata/komunitas kreatif tahun 2013 perlu disinkronisasikan dengan renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar dalam pengalokasian anggaran tepat pada sasaran.

Sementara itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu mengatakan, Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) dibentuk berdasarkan Keppres tanggal 1 Agustus 2011, menindaklanjuti ketentuan pasal 36 ayat 3 UU No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisata. Dengan tujuan agar pemerintah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

Mari Elka Pangestu juga menambahkan, Badan Promosi Pariwisata Indonesia berfungsi menjadi koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat maupun di daerah, dan mitra kerja pemerintah dan pemerintah daerah

Dikatakan, bahwa Kementerian pariwisata mempunyai visi ingin menjadi mitra terpercaya dari pemerintah Indonesia dalam mempromosikan pariwisata Indonesia untuk memperluas pemerataan, kreatifitas, dan kelanggengan terhadap masing-masing komponen. Juga untuk meningkatkan ekuitas bisnis pariwisata Indonesia pada lingkungan ekonomi yang dinamis.

Mari Elka Pangestu juga menegaskan, semua ini untuk mengkomersialisasikan talenta kreatif dari pariwisata Indonesia dalam gelombang budaya baru yang menantang, serta untuk memperkenalkan keberlanjutan masyarakat pariwisata Indonesia yang berada pada lingkungan alam yang endangered. (Spy).foto:wy/parle

Komisi IV Setuju Rancangan Alokasi Anggaran 2013 Kementerian Pertanian

Komisi IV DPR RI menyetujui usulan penyempurnaan rancangan alokasi anggaran tahun 2013 Kementerian Pertanian sebesar Rp 18,615 triliun.

Usulan tersebut disetujui setelah dilakukan realokasi 10% dari belanja barang pada Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2013 sebesar Rp 19,331 triliun.

Demikian salah satu butir kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian yang dipimpin Ketua Komisi IV Romahurmuziy di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (25/6)

Komisi IV DPR RI juga menerima penyampaian usulan penggunaan anggaran realokasi 10% dari belanja barang pada RAPBN Tahun 2013 sebesar Rp 715 milyar. Adapun mengenai program, kegiatan dan alokasi masing-masing unit Eselon I akan dibahas lebih mendalam bersama Eselon I terkait pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013, setelah penyampaian Nota Keuangan RAPBN Tahun 2013.

Rapat Kerja Komisi IV yang dihadiri Menteri Pertanian Suswono dan jajarannya, menyetujui usulan penggunaan APBN-P Kementerian Pertanian Tahun 2012 sebesar Rp 1,4 triliun.

Romy, sapaan akrab Ketua Komisi IV pada kesempatan yang sama menyetujui reward anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2012 sebesar Rp 10,306 milyar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.02/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Penetapan Pemberian dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011, yang dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Dalam Rapat Kerja Komisi IV yang berlangsung hingga sore hari itu bersepakat, agar penyediaan Bantuan



Rapat Komisi IV DPR membahas rancangan alokasi anggaran tahun 2013 dengan Kementerian Pertanian Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) pada RAPBN Tahun 2013 dapat diselenggarakan dengan subsidi harga pada Bagian Anggaran 999 dengan mekanisme Public Service Obligator (PSO) yang besaran subsidi akan dibahas lebih lanjut.

Selain itu, Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Pertanian untuk mengalokasikan anggaran program Village Breeding Center pada RAPBN Tahun 2013 dalam rangka program swasembada daging yang dilaksanakan dengan pola Public Service Obligation (PSO), yang besaran anggarannya diputuskan pada Rapat Kerja setelah penyampaian Nota Keuangan RAPBN Tahun 2013.

“Usulan pemerintah mengenai rincian jenis, volume, harga pokok penjualan dan Harga Eceran Tertinggi, dapat disetujui. Namun dalam hal

reorganisasi pelaksana penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana disepakati dalam Rapat Kerja tanggal 17 Januari 2012 belum dapat dilaksanakan pada tahun 2012,” papar Romy.

“Komisi IV menerima penyampaian usulan Pagu Anggaran Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 15.943 Triliun. Adapun rincian besaran subsidi perjenis pupuk dan organisasi pelaksanaannya akan dibahas pada Masa Persidangan berikutnya,” tambahnya.

Sedangkan pembahasan mengenai alokasi dan peruntukan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan pada RAPBN Tahun 2013, Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian sepakat akan dilakukan pembahasan secara khusus pada Masa Persidangan berikutnya setelah penyampaian Nota Keuangan RAPBN Tahun 2013. (sc)foto:wy/parle

Anggaran Gedung Baru KPK Terus Dikaji

Komisi III DPR RI masih terus mendalami usulan anggaran tahun 2013 yang disampaikan 13 kementerian lembaga yang menjadi mitra kerjanya termasuk anggaran Gedung Baru KPK



Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika saat memimpin rapat dengan mitra kerja

Kebijakan anggaran yang ditetapkan diharapkan dapat menunjang ketegasan dan keberpihakan pada politik penegakan hukum di tanah air.

“Kita fokus pada semuanya bukan pada satu pihak, kementerian atau lembaga saja,” kata Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/6/12).

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan pembahasan saat ini me-

masukinya penetapan Pagu Indikatif yaitu perkiraan pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja).

Untuk mengejar tenggat penyelesaian pembahasan anggaran, Komisi III menggelar rapat maraton dengan mitra terkait, misalnya saja, hari ini dijadwalkan Rapat dengan mitra seperti Komnas HAM, PPAK, BNPT, Sekreta-

riat MA dan KY. “Malam harinya nanti akan dilanjutkan pembahasan dengan KPK dan LPSK,”ujarnya.

Kaji Pembangunan Gedung Baru KPK

Dihubungi pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi III Tjatur Sapto Edi mengingatkan segenap pihak agar tidak terjebak kondisi yang tidak produktif terkait pro kontra rencana pembangunan gedung baru KPK.

“Tunggu saja pembahasannya anggarannya di sini, masih terus dikaji kok termasuk juga anggaran kementerian lembaga lainnya,” tandas politisi PAN ini.

Ia mengingatkan saat ini beberapa lembaga seperti LPSK, BNN, BNPT juga mengajukan anggaran pembangunan gedung baru kepada DPR. Bahkan ada yang sudah lebih dahulu menyampaikan proposal dibanding KPK.

Dalam rapat sebelumnya baru satu fraksi yang secara tegas menyatakan dukungan yaitu FP Hanura. Sedangkan fraksi lainnya cenderung menunggu proses pembahasan anggaran yang saat ini masih berlangsung. (iky)foto: wy/parle

Komisi X DPR Sepakat Program Wajib Belajar 12 Tahun Dilaksanakan 2013

Komisi X DPR sepakat Wajib Belajar 12 tahun segera dilaksanakan pada tahun 2013. Demikian yang terungkap dalam Rapat Kerja antara Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Moh. Nuh, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto, di Gedung Nusantara I, Senin, (25/6)

Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bahri mengemukakan, dalam postur anggaran itu harus terlihat dan harus menjadi keputusan bersama antara Mendikbud dengan DPR.

Syamsul mengatakan, dalam anggaran tersebut juga terdapat dana

BOS untuk SD, SMP dan SMA. “BOS tersebut bisa juga dianggap sebagai infestasi karena BOS itu jelas dapat membantu anak-anak untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam belajar dalam bidang pendidikan,”ujarnya.

Dia menegaskan, dalam masa tran-

sisi di tahun 2013 nanti Mendikbud berkordinasi dengan Kementerian yang lain untuk memberikan informasi bagaimana anggaran pendidikan itu digunakan secara optimal.

Dikatakan juga bahwa Komisi X DPR tidak ingin mengintervensi Ke-



Jajaran Pimpinan komisi X DPR RI saat rapat kerja dengan Kemendikbud

mendikbud tetapi yang kita inginkan agar anggaran di Kemendikbud bisa efektif dan terarah.

Syamsul mengatakan, Menteri Pen-

didikan dan Kebudayaan berhak meminta informasi semacam itu, dari kementerian yang lain, karena Mendikbud yang diberi tanggungjawab

tentang pendidikan, bukan yang lain-lain.

Komisi X DPR juga mendesak Pemerintah agar melakukan kajian komprehensif mengenai posisi hukum dan efektivitas penggunaan anggaran fungsi pendidikan yang ditransfer ke daerah dalam bentuk DBH, DAK, DAU dan Otsus.

Syamsul Bahri juga menegaskan, Komisi X DPR bersama Pemerintah sepakat untuk melaksanakan amnggaran fungsi pendidikan sekurangnya sebesar 20% dari APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 31 ayat 4 UUD tahun 1945, pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. (Spy).

Enam Anggota Dewan Komisiner OJK Disetujui

DPR menyetujui enam anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk masa jabatan 2012-2017.

Demikian keputusan rapat Paripurna DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, di Gedung Nusantara I, Selasa, (25/6). Berikut nama anggota terpilih tersebut, Nurhaida dengan perolehan 54 suara, Firdaus Djaelani 53 suara, Kusmaningtuti S. Soetiono 53 suara, Ilya Avianti 50 suara, Nelson Tampubolon 44 suara, Rahmat Waluyanto 40 suara.

Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis mengatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Tata Tertib DPR RI, dalam pemilihan Ketua Dewan Komisiner OJK, Komisi XI DPR berdasarkan musyawarah dan mufakat menyepakati secara aklamasi memilih saudara Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Ketua Komisiner OJK masa jabatan 2012-2017.

Emir menambahkan, tahap kedua kemudian memilih enam dari tiga belas calon anggota Dewan Komisiner sesuai dengan ketentuan pasal 272 Tata Tertib DPR RI, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso bersama enam anggota dewan Komisiner OJK

Kemudian, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menanyakan apakah semua dapat disetujui menjadi ketua dan anggota OJK? setujuu teriak selu-

ruh mayoritas anggota. Selanjutnya Priyo mengatakan, ini akan diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang ada. (si)/foto:iwan armanias/parle.

Delegasi Parlemen Inggris Tanyakan Perkembangan HAM di Indonesia

Sejumlah anggota Komisi III DPR saling bertukar pikiran dengan delegasi Parlemen Inggris. Isu yang dibicarakan cukup beragam diantaranya persoalan HAM dan Terorisme.

“Kita menjamin Hak Asasi Manusia di Indonesia, namun kita masih ada masalah terkait persoalan akses dan kontrol terhadap SDA,” ujar anggota DPR dari PDIP Eva Sundari,

pemberantasan korupsi, dan melaksanakan standar pelayanan prima.” Ini sangat kita apresiasi, bahkan bagi kepala polisi yang tidak dapat menjalankan komitmen tersebut akan

dalam memproses hukum dan dakwaan terkait kasus ini.” Untuk perbaikan kami sedang memperbaiki KUHP dan KUHP demi perbaikan hukum kedepannya,” ujarnya.

Sementara Adang Daradjatun (F-PKS) mengatakan, era reformasi persoalan hak asasi menjadi perhatian utama bangsa Indonesia dan hal ini mencerminkan Indonesia sangat berkomitmen terhadap penegakan HAM. “Komnas HAM memiliki peran utama dan kita memprioritaskan budgetingnya lembaga itu pada tahun 2013 nanti,” paparnya.

Terkait konflik sosial, Sekarang ini persoalan akar budaya sering dimunculkan dalam perkembangan konflik ini, karena itu DPR ingin pemerintah menjadi penengah artinya jangan sampai masyarakat kecil merasa ditindas oleh Perusahaan besar.

Pada tempat terpisah, Ketua BKSAP Surahman Hidayat menegaskan, Indonesia sangat peduli terhadap persoalan HAM. “Konstitusi RI menegaskan jaminan Hak asasi tersebut serta UU lainnya selain itu, umat Islam mendukung kebebasan HAM di Indonesia,” katanya. (si)/foto:iwan armanias/parle.



Sejumlah anggota komisi III DPR saat menerima kunjungan delegasi Parlemen Inggris

kepada delegasi Parlemen Inggris yang dipimpin oleh Anne McGuire, di Gedung Nusantara II, Selasa, (26/6).

Menurutnya, saat ini Polri memiliki 10 komitmen termasuk komitmen

dicopot,” terangnya.

Menyinggung kasus Ahmadiyah, paparnya, memang sangat disesalkan dapat terjadi persoalan ini, dan kita menyesalkan tindakan Kepolisian

Komisi IV DPR RI Setujui RAPBN Kehutanan 2013 Rp. 5.9 Triliun

Komisi IV DPR RI menyetujui usulan penyempurnaan rancangan alokasi anggaran tahun 2013 Kementerian Kehutanan sebesar Rp 5,956 triliun setelah dilakukan realokasi 10% dari belanja barang pada Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2013 sebesar Rp 6,381 triliun.

Demikian salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kehutanan yang dihadiri Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan jajarannya di Gedung DPR

RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/6)

“Komisi IV DPR RI dapat menerima penyampaian usulan penggunaan anggaran realokasi 10% dari belanja barang pada RAPBN Tahun 2013 sebesar

Rp 424,957 milyar,” kata Ketua Komisi IV Romihurmuziy di akhir rapat kerja tersebut.

“Adapun mengenai program, kegiatan dan alokasi masing-masing unit

Eselon I akan dibahas lebih mendalam bersama Eselon I terkait pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013, setelah penyampaian Nota Keuangan RAPBN Tahun 2013,” tambahnya.

Demikian pula dengan pembahasan alokasi dan peruntukan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan pada RAPBN Tahun 2013, menurut Romy akan dibahas secara khusus pada Masa Persidangan berikutnya setelah penyampaian Nota Keuangan RAPBN Tahun 2013.

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI juga menyepakati bahwa penyusunan program sosial untuk merehabilitasi kawasan hutan dan lahan yang rusak akan menggunakan sumber dana Dana Reboisasi (DR). (sc)



DPR Setujui Perjanjian Pertahanan RI Dengan Italia dan Ceko

Paripurna DPR menyetujui RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Ceko tentang kegiatan kerjasama di bidang Pertahanan dan RUU tentang pengesahan MOU Dephan RI dan Kemenhan Republik Italia tentang kerjasama bidang peralatan, logistik dan Industri Pertahanan.

“Kerjasama dengan industri militer atau pertahanan Republik Ceko dan Italia diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri pertahanan dalam negeri,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanudin dihadapan Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, di Gedung Nusantara II, Selasa, (26/6).

Menurutnya, hal ini sejalan dengan program revitalisasi industri pertahanan yang mengedepankan penguasaan teknologi militer dan pemberdayaan industri pertahanan.

Dia menambahkan, materi muatan atau ruang lingkup dari kedua perjanjian tersebut merupakan kerjasama teknis yang meliputi pertukaran informasi dalam pengemangan urusan pertahanan, pertukaran para perwira untuk pendidikan di sekolah-sekolah staf dan pelatihan profesional.

Selain itu, kerjasama juga memuat pertukaran data ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga ahli, pelatihan

dan bentuk-bentuk kerjasama teknis lainnya sesuai dengan kepentingan pertahanan, kerjasama antara institusi pertahanan meliputi teknologi dan industri pertahanan untuk keuntungan dan kepentingan bersama.

“Komisi I DPR berharap agar kedua

perjanjian bilateral ini dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan dan pemberdayaan industri strategis pertahanan yang saat ini merupakan salah satu isu prioritas yang menjadi perhatian utama di Komisi I DPR,” tambahnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso (kanan) saat memimpin rapat Paripurna DPR

Panja Minerba Lakukan Kunjungan Ke Jatim

Komisi VII DPR RI yang tergabung dalam Panitia Kerja Mineral dan Batu Bara (Panja Minerba) melakukan kunjungan lapangan ke Jawa Timur (28/6). Kunjungan dipimpin Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana dan diikuti sembilan orang anggota Komisi VII lainnya.



Suasana rapat Komisi VII DPR



Ketua Komisi VII DPR Soetan Bhatoeghana

Dalam kunjungan kerja kali ini, Tim Panja Minerba Komisi VII DPR RI melakukan peninjauan lapangan ke PT Smelting yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur.

Dari kunjungan ini, Tim Panja Minerba berharap adanya masukan dan informasi mengenai aktifitas PT. Smelting terkait dengan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.

Sutan mengatakan, UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) mengamanat-

kan peningkatan nilai tambah pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri dimana untuk pemegang kontrak karya yang sudah memproduksi wajib melakukan pemurnian selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU Minerba diundangkan.

Sedangkan untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri No. 7 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral serta penetapan

pemberlakuan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar.

Untuk itu, kata Sutan, pada Kunjungan Lapangan Panja Minerba Komisi VII DPR RI ke PT. Smelting ini ingin mendapatkan masukan dan informasi termasuk kendala-kendala yang dihadapi, aktifitas PT. Smelting dalam peningkatan nilai tambah pertambangan melalui pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.

PT Smelting Gresik merupakan Pabrik pengolahan biji tembaga menjadi tembaga murni, dengan tingkat kemurnian sampai 99,99%. Proses pengolahan yang dilakukan disini adalah dengan menggunakan metode mitsubishi proses yang dikembangkan pada tahun 1970-1980 yang merupakan metode paling modern dalam pengolahan tembaga. Dan hanya ada 5 pabrik di dunia ini yang menggunakan mitsubishi proses ini, salah satunya adalah di PT Smelting Gresik.

Selain mengadakan kunjungan lapangan, Tim Panja Minerba juga akan mengadakan pertemuan dengan Direksi PT. Smelting beserta jajarannya. (tt)foto: wy/parle

Komisi I DPR Bahas Persoalan Papua dengan Parlemen Inggris

Sejumlah anggota Komisi I DPR menjelaskan mengenai posisi Parlemen dan Pemerintah Indonesia terkait persoalan di Papua kepada delegasi Parlemen Inggris.



Anggota Komisi I Tantowi Yahya

kerjasama antara parlemen Indonesia dan Inggris. Hal ini sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah Indonesia untuk membangun second track diplomacy,” tegasnya.

Tantowi menjelaskan, pertemuan tersebut juga sempat membahas mengenai ketegangan terkait Cina Selatan dan keterlibatan negara lainnya dalam konflik itu. “Ini merupakan persoalan yang tidak unjung usai, banyak pihak yang terlibat disitu, seperti Cina, Filipina, dan Vietnam, dan negara lainnya,” katanya

Menurutnya, ini tidak bisa diselesaikan tanpa campur tangan dan keikutsertaan pihak lain sebagai penengah. “kita mengharapkan Inggris karena kedekatan dengan AS bisa membujuk mereka, Indonesiapun dapat memainkan perannya karena

Hal itu mengemuka saat Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan, intelejen, Luar Negeri, Komunikasi dan informasi menerima delegasi Parlemen Inggris yang dipimpin Anne McGuire, di Gedung Nusantara I, Senin, (25/6).

“Papua menjadi isu internasional yang sangat seksi dan bukan hanya Inggris tetapi negara lainpun pasti menyinggung soal Papua ini. tugas parlemen itu memberikan kejelasan kepada parlemen negara lain,” papar Anggota DPR Tantowi Yahya se usai menerima delegasi Parlemen Inggris.

Menurutnya, Pemerintah melihat tidak ada masalah yang besar di Papua, sementara Parlemen melihat ada hal fundamental yang harus diselesaikan segera oleh pemerintah, maupun parlemen. “Begitu juga dengan parlemen Inggris dan pemerintah posisi mereka berbeda menanggapi isu separatisme, itu namanya check and balances,”ujarnya.

Selain isu pertahanan, lanjutnya,



Anggota Komisi I Tantowi Yahya saat menerima kunjungan Delegasi Parlemen Inggris

Pertemuan antar anggota Parlemen juga membahas isu yang terkait intelejen, luar negeri dan informasi. “banyak hal yang dapat kita sinergikan dan lakukan sehingga dapat terbina

kedekatan dengan Cina. supaya tidak terjadi ketegangan yang semakin memuncak dan konflik terbuka di masa datang,” paparnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi VII DPR Jajal Mobil Listrik Buatan Kemenristek

Sejumlah anggota Komisi VII DPR menjajal kemampuan mobil listrik prototipe buatan Kemenristek yang sudah mencapai tingkatan produk siap pakai sebagai kendaraan dengan kapasitas 17 penumpang.



uji coba prototipe bus listrik di depan Gedung DPR RI



Sejumlah anggota komisi VII mencoba prototipe bus listrik produksi dari Kemenristek

Terlihat Satya Yudha (F-PG), Halim Kalla (F-PG), Wakil Ketua Komisi VII DPR Ahmad Fahrial, Tengku Irwan (F-PD), Alimin Abdullah (F-PAN), dan Menristek Gusti Muhammad Hatta, Gde Sumarjaya Linggih (F-PG) menaiki mobil kebanggaan peneliti Indonesia tersebut.

Bus listrik tersebut bisa dipergunakan sebagai salah satu mobil yang

tidak memiliki knalpot, karena tidak menggunakan BBM dan oli mesinnya. Menurut Rilis dari Kemenristek, bus tersebut juga tidak melakukan pencemaran lingkungan karena tidak ada emisi buangnya.

Bus listrik merupakan salah satu rangkaian prototipe yang telah dihasilkan para peneliti dan perekayasa yang bekerja mengembangkan mobil

listrik sejak 15 tahun lalu. Beberapa tahun lalu sudah dihasilkan prototipe mobil listrik konversi dan mobil hybrid. Bahkan sekitar 4 bulan lagi akan lahir prototipe mobil hybrid.

Menurut Satya Yudha (F-PG), Komisi VII DPR mengharapkan kehadiran mobil listrik ini dapat mengurangi beban subsidi, dan diharapkan energi primernya bukan BBM tetapi bisa batubara, geothermal, gas dan sebagainya. "Hal ini juga mengurangi konsumsi kendaraan dan penggunaannya, dan konsumsi BBM yang akan digunakan menjadi listrik,"ujarnya.

Komisi VII DPR, desak Satya, mengharapkan adanya insentif pajak sehingga harga menjadi lebih terjangkau oleh masyarakat. "karena pemakaian ini dapat mengurangi pemakaian BBM dua kali di listrik dan mobilnya. pajak diberikan insentif sehingga pendapatan negara keseluruhan tidak terganggu karena subsidi BBM berkurang dan itu kita kompensasi pengembalian pajak itu,"paparnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.

RUU PPKD untuk Rakyat di Kepulauan yang Termarjinalkan

Pansus RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (PPDK) memulai rangkaian persidangan untuk menuntaskan tatanan hukum yang akan menunjukkan keberpihakan kepada rakyat Indonesia yang tinggal wilayah kepulauan dan pesisir.

“RUU PPKD merupakan usul inisiatif DPR kita persembahkan bagi rakyat Indonesia terutama yang tinggal di kepulauan karena mereka selama ini telah termarjinalkan. Saatnya pemerintah memberikan perhatian lebih pada mereka,” kata Ketua Pansus, Abdul Gaffar Patappe usai memimpin rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/6/12).

Ia menekankan keberhasilan pembahasan RUU ini sangat bergantung pada keseriusan pemerintah. Selama ini rakyat yang berapa di kepulauan dan pesisir sudah terlalu lama menagih janji perbaikan pembangunan dan kesejahteraan mereka. Sikap resmi pemerintah terhadap produk legislasi usulan DPR ini akan disampaikan dalam rapat pansus yang dijadwalkan (4/7).

Sementara itu Wakil Ketua Pansus RUU PPKD Alexander Litaay yang menyampaikan pidato pengantar musyawarah DPR menekankan NKRI secara geografis adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau. Dari jumlah itu 11.801 pulau ternyata belum punya nama.

“Sebagian besar pulau merupakan kawasan tertinggal dan banyak yang tidak berpenghuni. Fakta menunjukkan sebanyak 60% penduduk atau setara 140 juta penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil yang kurang tersentuh pembangunan,” tandas Alex yang juga politisi PDIP ini.

Masalah lain yang mengemuka adalah, keterbatasan pelayanan administrasi pemerintahan, pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya, sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi antar pulau. Ia juga menggarisbawahi sering terjadinya kegiatan ilegal dan penyeludupan yang dapat mengancam stabilitas keamanan.

Pansus yang beranggotakan 30 orang dari lintas komisi bersama peme-



Ketua Pansus Abdul Gaffar Patappe (tengah) setelah rapat Pansus RUU PPKD



Ketua Pansus Abdul Gaffar Patappe (tengah) saat memimpin rapat Pansus RUU PPKD

rintah diharapkan melahirkan RUU PPKD yang mempercepat pembangunan di daerah kepulauan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan

mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan karakteristik khas daerah kepulauan. (iky)foto:wy/parle



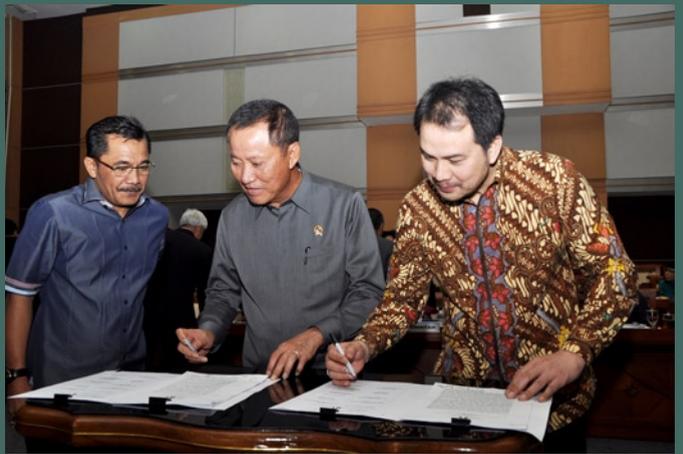
Wakil Ketua DPR Pramono Anung menerima kunjungan Deputi Perdana Menteri Bidang Energi Republik Irak, Hussain al'Sharristani, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, (25/06) foto:RY



Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya saat menerima kunjungan Delegasi Parlemen Inggris membahas persoalan terorisme, dan konflik Papua, di Gedung Nusantara I DPR (25/06) foto:iw



Rapat Pleno Komisi III DPR, menyepakati RUU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) untuk segera disetujui pada rapat paripurna, (27/06) foto:wy



Pansus RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (PPDK) sedang membahas persoalan daerah pesisir dengan mitra kerja, yang dipimpin oleh Abdul Gaffar Patappe, di Ruang Pansus C Gedung DPR RI, (28/06). foto:WY

